

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kerjasama antara Norwegia dan Indonesia dalam program REDD+ dibangun dengan tujuan untuk secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. LoI antara Indonesia dan Norwegia Niat Indonesia terhadap Norwegia adalah hasil dari politik Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon Indonesia, dan Norwegia adalah donor yang memberikan hibah kepada Indonesia untuk melindungi hutan Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan. Melalui LoI antara Indonesia dan Norwegia, pihak Indonesia akan menerima 1 miliar dolar AS untuk menyelamatkan hutan Indonesia.

LoI Indonesia dan Norwegia digunakan bersama dalam tiga Fase, yaitu Fase persiapan, Fase kedua adalah Fase transformasi, di mana Indonesia akan menerima dana \$200 juta dalam dua Fase ini untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk program REDD+ yang dimulai tahun 2010-2013. Selanjutnya, dana \$ 800 juta akan disediakan Pada fase ketiga, sistem REDD+ pada dasarnya memiliki peluang besar sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. REDD+ menjadi mekanisme global untuk mendorong negara berkembang melindungi dan mengelola hutan dengan lebih baik dan lebih cerdas serta memajukan perjuangan global. Informasi tentang pengurangan emisi gas Karbon dihitung berdasarkan Fase implementasi REDD+, Pada Fase 2 2014-2017 Indonesia mampu menurunkan emisi dengan total 4,8 juta ton

CO₂eq. Pada Fase 3 2018-2020, Indonesia mengurangi emisi karbon sebesar 11,2 juta ton.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi pada Fase ini, terutama terkait penerapannya di negara berkembang. Sejauh ini tujuan kerjasama belum tercapai/gagal. Namun kegagalan tersebut tidak menyebabkan Norwegia menghentikan kerjasama tersebut, melainkan melanjutkan kerjasama REDD+. Sistem ini terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan multi-stakeholder. Terlepas dari insentif yang ditawarkan, REDD+ masih membutuhkan bukti untuk mendapatkan kepercayaan, terutama di negara berkembang. Beberapa faktor mempengaruhi keberlanjutan kerjasama REDD+ antara Norwegia dan Indonesia. Dari perspektif ini, ada tiga faktor utama yang menghambat kerjasama tersebut, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lingkungan.

Ekonomi menjadi hal penting didalamnya. ketergantungan negara berkembang seperti indonesia terhadap ekonominya membuat beberapa hal serta pokok upaya dalam kerjasama ini ini. ekonomi indonesia hingga saat ini masih bergantung terhadap lingkungan dan sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan terutama kelapa sawit. pembukaan lahan untuk dua sektor tersebut membuat sulitnya kerjasama ini berjalan, dimana dua sektor tersebut melakukan penebangan atau pengosongan lahan pada hutan yang tersedia, bukan hanya hutan produksi, yang dimana hal ini meningkatkan adanya deforestasi di beberapa titik lahan percontohan terutama pada Kalimantan, Sumatra, Serta Papua. Disusul dengan faktor sosial yang berperan penting, karena salah satu visi REDD+ adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar daerah

percontohan, sayangnya dalam pengaplikasiannya masyarakat, terutama masyarakat adat kurang diajak atau diikuti serta dalam pemenuhan kebutuhan kerjasama, dengan tidak dipenuhinya hak hak mereka, selain itu sebagian dari masyarakat adat harus kehilangan mata pencaharian mereka, karena hutan yang biasa mereka garap, dilarang untuk mereka gunakan kembali dengan dalih digunakan sebagai wilayah percontohan. Serta didukung dengan faktor lingkungan yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah karena masih banyak undang undang atau peraturan yang dianggap pro-deforestasi, terutama peraturan yang mengatur tentang pembangunan ekonomi. hal ini dianggap mengganggu jalannya kerjasama ini, dimana sebagian dari peraturan mengenai pembangunan ekonomi mengijinkan dengan mudah adanya pembukaan lahan pertambangan maupun perkebunan. Maka hal ini mengganggu luas hutan atau tutupan pohon di Indonesia itu sendiri. moratorium sendiri dianggap tidak terlalu berpengaruh, selain karena moratorium hanya sekedar instruksi presiden tanpa ada hukuman pasti bagi yang melanggar, peraturan peraturan lain dianggap lebih masuk akal dan mudah dilakukan dari pada harus mempertahankan kondisi hutan yang dianggap kurang ada keuntungan bagi pemerintah.

4.2 Saran

Mengenai isu REDD+ dan mitigasi perubahan iklim global, saran penulis adalah diperlukan kepemimpinan pemerintah yang kuat dalam negosiasi lingkungan di tingkat global untuk memungkinkan dukungan masyarakat internasional dan negosiasi yang lebih efektif. Tujuannya tidak boleh terbatas pada mempromosikan pengurangan deforestasi, tetapi harus menjadi reformasi menyeluruh pengelolaan hutan global, terutama di negara-negara berkembang. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi

saat ini telah menjadi bagian dari model pemanfaatan hutan, terutama di negara-negara berkembang, sehingga tidak lagi menjadi hambatan dalam penyelamatan hutan dunia. Penguatan aspek teknis REDD+ di tingkat global dan nasional menjamin keberhasilan REDD+. Aspek teknis ini justru menjembatani interaksi antar aktor untuk mengetahui secara jelas pembagian tanggung jawab, hak dan harapan masing-masing pihak. Ini akan memastikan hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Selain itu, pengenalan program-program REDD+ sehingga dapat diimplementasikan lebih mendalam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk lebih terlibat dalam pelaksanaan program REDD+, pemerintah dan lembaga REDD+ harus mampu mengkomunikasikan sistem tersebut. REDD+ bagi masyarakat adat untuk bekerja bahu membahu dalam memecahkan masalah hutan.